

ABSTRAKSI

Dalam hal menangani masalah meningkatnya gelandangan dan pengemis terutama di daerah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dimana meningkatnya jumlah gelandangan pengemis terutama di lokasi-lokasi yang diidentifikasi sebagai daerah rawan gepeng ini memberikan pandangan “negatif” terhadap ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota Yogyakarta bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Keadaan ini yang melatar belakangi dikeluarkannya PP NO. 31 Tahun 1981 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Namun, yang diperlukan tentunya bukan hanya sekedar tersedianya peraturan tetapi yang paling mungkin dilakukan adalah bagaimana memecahkan teka-teki disekitar pelaksanaan (*implementation*) penanganan tersebut.

Implementasi Program Rehabilitasi gelandangan dan pengemis ini bertujuan untuk (1) adanya peran serta masyarakat membantu gelandangan dan pengemis, serta, (2) mengembangkan kemampuan gelandangan dan pengemis guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak ditandai dengan adanya perubahan Kualitas Fisik (KF) dan Kualitas Non Fisik (KNF) mereka.

Dimana, dalam tulisan ini penulis mencoba mencermati dan mengemukakan bagaimana proses implementasi Program Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis melalui upaya rehabilitatif dalam program rehabilitasi gelandangan dan pengemis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendiskripsikan proses implementasi Program Rehabilitasi tersebut, yang meliputi beberapa kegiatan yakni (1) pendekatan awal yang terdiri dari beberapa langkah yaitu mengadakan orientasi mengenai kondisi dan situasi gepeng, identifikasi terhadap gepeng tentang kemungkinan program penanganan yang akan diberikan, dan memotivasi para gepeng, (2) penerimaan yang terdiri dari beberapa langkah yaitu registrasi, penelaahan dan pengungkapan masalah, dan penempatan gepeng ke dalam panti, (3) dan bimbingan dan latihan yang terdiri dari bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari implementasi yang dilakukan diketahui terdapat Inefektivitas terhadap pencapaian tujuan yang ditunjukkan dari: 1) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis ini, 2) rendahnya tingkat perubahan Kualitas Fisik (KF) klien untuk menjadi lebih mandiri sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas hidup klien setelah mengikuti program, 3) rendahnya Kualitas Non Fisik (KNF) Klien yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya ex-klien yang melakukan tindak pergelandangan dan pengemis serta tingginya tingkat ketergantungan klien.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inefektifitas ini adalah: 1) Resorser, yang terdiri dari untuk variabel resorser yang terdiri dari : sumber daya aparat diketahui bahwa jumlah aparat yang tersedia serta kemampuan dan tingkat pendidikan yang mereka miliki masih kurang memadai; belum konsistennya pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan program, serta

adanya upaya perbaikan akan penyediaan anggaran yang menunjukkan tingkat konsistensi pemerintah terhadap ketersediaan anggaran; 2) faktor komunikasi dinilai tidak konsisten, 3) faktor Disposisi atau sikap Implementor dinilai dari indikator tanggung jawab dinilai cukup baik sedangkan untuk tingkat fleksibilitas aparat dinilai kurang (rendah), 4) serta faktor Struktur Birokrasi dilihat dari indikator struktur organisasi dinas dinilai baik, namun tidak sama halnya dengan koordinasi baik intern dan ekstern organisasi yang dinilai tidak berjalan dengan baik.

Akhirnya, penulis menganjurkan bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini akan lebih baik hasilnya bila: 1) dalam proses rehabilitatif tersebut hendaknya lebih menekankan pada pencapaian kepuasan dan kemandirian klien melalui komunikasi dua arah dan menghindari sifat kaku dalam setiap kegiatan pembinaan maupun penyuluhan pada klien, 2) perbaikan proses pembinaan selama mengikuti program dan keterlibatan semua pihak termasuk di dalamnya masyarakat untuk membantu ex-klien Untuk itu, menurut penulis ada tiga kategori yang harus dipenuhi yakni pertemanan, kesetaraan dan partisipasi dari berbagai pihak., 3) serta, kembali terjalinnya kerjasama antar wilayah pemerintahan dalam penanganan masalah ini atau diadakannya kembali program transmigrasi sebagai bentuk kerjasama antara departemen transmigrasi dan departemen sosial.

ABSTRACT

In the case of handling the increase of vagrant and beggar, mainly in the urban area, such as Yogyakarta, in which the increasing number of vagrant and beggar mainly in locations identified as troubled areas giving negative view to the obedience, comfort and the beauty of the Yogyakarta is not an easy task. The background of the application of PP number 31 in the year of 1981 about the Handling of Vagrant and Beggar. But, the thing needed is certainly not only the availability of regulation, but the most possible thing is how to solve the puzzle around the implementation of the handling.

The implementation of rehabilitation program of vagrant and beggar is aimed to (1) the availability of society's participation in helping vagrant and beggar, and (2) develop the ability of the vagrant and beggar to achieve the liable living level, marked with the existence of Physical Quality (PQ) and Non-Physical Quality (NPQ).

In which in this paper, the writer tried to study and state how the process of the implementation of rehabilitation program of vagrant and beggar through the effort of rehabilitative program in the program of rehabilitation of vagrant and beggar was carried out using qualitative approach aiming to describe the implementation process of the rehabilitation program, comprising of several activities (1) initial approach comprising of several steps, i.e., holding the orientation about the condition and the situation of vagrant and beggar, identification toward vagrant and beggar about the possibility of the handling program given, and motivating the vagrant and beggar, (2) acceptance comprising of several steps, i.e., registration, problem formulation and study, and the allocation of vagrant and beggar in the dormitory, (3) and guidance and training, comprising of physical and mental guidance, social guidance, and skill guidance.

The result of the study showed that from the implementation carried out, it was found out that there was ineffectiveness toward the achievement of the goals shown from: 1) the low level of society's participation in handling vagrant and beggar, 2) the low level of the change of physical quality (KF) of the client to be more mature, so that it affects also toward the clients' quality of life after joining the program, 3) the low level of the Non Physical Quality (KNF) of the client shown from the existence of ex-client being vagrant and beggar and the high level of client dependency.

The factors affecting the ineffectiveness were: 1) Resources, comprising of resource variable, in which it comprised of officers resource, known that the number, the skill and the educational level of the officer are not adequate; inconsistency of the Yogyakarta County government in the availability of structure and infrastructure of the program holding, and the existence of the adjustment of the providence of fund showing the level of consistency of the government toward the fund, 2) the communication factors viewed as inconsistency, 3) disposition factor or implementor viewed from the indicator of responsibility as good enough, while to the flexibility level, the officers are assessed as low, 4) and the factor of Bureaucratic Structure viewed from the indicator of

the organizational structure of the official is good, but it is not the same with coordination, wither intern or extern of the organization viewed as not run well.

Finally, the writer suggested that in handling the vagrant and beggar, it is better if: 1) in the rehabilitative process, it should more emphasize on the achievement of satisfaction and the maturity of the client through the two-ways communication and avoidance of the awkward in each guiding activities or the guidance of the client, 2) the adjustment of guidance process within following the program and the involvement of all parties, including society to help ex-client. Therefore, according to the writer, there were three category to meet, friendship, balance, and participation of all parties, 3) and, the cooperation among districts and the handling of the problem or the implementation of the transmigration program as a form of cooperation between the transmigration department and social department.